



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKJIP TAHUN 2025



Jl. A.Yani No.1 Telp-Fax. (0741) 66269
e-Mail : diskominfo@Jambiprov.go.id
Website [http : // diskominfo.Jambiprov.go.id](http://diskominfo.Jambiprov.go.id)



Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKJIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan Penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKJIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat secara keseluruhan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jambi, 30 Januari 2026

KEPALA DINAS,



Drs. ARIANSYAH, ME

Pembina Utama Madya

NIP. 19720603 199302 1 001

Ikhtisar Eksekutif



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Kominfo Provinsi Jambi yang dihasilkan di tahun 2025, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatkan Keterbukaan Informasi Kepada Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dilingkungan Pemprov Jambi, dengan indikatornya Peringkat keterbukaan Informasi publik dengan capaian 101,54%;
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektorial dengan indikatornya Indeks Pembangunan Statistik dengan capaian 95.71%;
3. Sasaran Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikatornya Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dengan capaian 100,30%;
4. Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dengan indikatornya Persentase Capaian Indeks Keamanan Informasi dengan capaian 122,52%;
5. Sasaran Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan Akuntabilitas Kinerja dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian 108,46% dan Indikator Nilai AKIP dengan capaian 98,6%; dan

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kominfo Provinsi Jambi ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan;
2. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah melalui pendekatan yang bersifat kualitatif; dan

3. Menindaklanjuti rencana perbaikan setiap sasaran dan indikator Tahun 2026.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai dasar bagi Dinas Kominfo Provinsi Jambi dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GRAFIK	7
DAFTAR GAMBAR	8
BAB 1 PENDAHULUAN	9
1.1 Struktur Organisasi.....	10
1.2 Tugas dan Fungsi.....	11
1.3 Isu-isu Strategis	11
1.4 Keadaan Pegawai	12
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	15
1.6 Keuangan	16
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	16
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	19
2.1 Perencanaan Strategis	19
2.1.1.Visi dan Misi Kepala Daerah	20
2.1.2Tujuan dan Sasaran Perangkat DaerahTujuan.....	22
2.1.3Strategi dan Arah Kebijakan.....	24
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	25
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025	26
2.3.1Target Belanja Dinas Kominfo Provinsi Jambi	26
2.3.2Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	26
2.4 Instrumen Pendukung.....	27
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025	29
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Kinerja Lainnya.	30
3.3. Realisasi Anggaran	49
BAB 4 PENUTUP	58
LAMPIRAN	

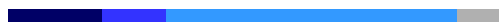
Daftar Tabel

Tabel 1.1 Aset-aset Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi	15
Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026.....	21
Tabel 2.2 Sasaran Strategis Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2021-2026	23
Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2021-2026	24
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	25
Tabel 2.5 Target Belanja Dinas Kominfo Provinsi Jambi APBD Perubahan Tahun 2025... ..	26
Tabel 2.6 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.....	27
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	29
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2025	29
Tabel 3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Kinerja Lainnya ..	30
Tabel 3.4. Kualifikasi Penilaian Keterbukaan Informasi	31
Tabel 3.5. Penilaian Kuisioner Keterbukaan Informasi	32
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Tahun 2023-2025	32
Tabel 3.7 Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah	33
Tabel 3.8 Sasaran 2	34
Tabel 3.9 Realisasi Sasaran 2 Tahun 2023-2025	35
Tabel 3.10 Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah	36
Tabel 3.11 Sasaran 3	37
Tabel 3.12 Tingkat Kematangan Penerapan SPBE	37
Tabel 3.13 Nilai Domain dan Apek SPBE Provinsi Jambi Tahun 2025	38
Tabel 3.14 Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2023-2025.....	39
Tabel 3.15 Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah	40
Tabel 3.16 Sasaran 4	41
Tabel 3.17 Capaian Kinerja Tahun 2023-2025	42
Tabel 3.18 Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah	43
Tabel 3.19 Sasaran 5	44
Tabel 3.20 Pengukuran IKM.....	45
Tabel 3.21 Capaian Kinerja Tahun 2023-2025	46
Tabel 3.22 Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah	46
Tabel 3.23 Sasaran 6	47
Tabel 3.24 Nilai Akuntabilitas Kinerja	47
Tabel 3.25 Realisasi Tahun 2022-2026.....	48
Tabel 3.26 Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah	49
Tabel 3.27 Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2025 ..	49
Tabel 3.28 Analisis efisiensi Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2025	56

Daftar Grafik

Grafik 1.1. Grafik Profil Kepegawaian berdasarkan Jenis Jabatan Kepegawaian Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2025	13
Grafik 1.2. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas KominfoProvinsi Jambi Tahun 2025	14
Grafik 1.3. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2025.....	14
Grafik 3.1. Distribusi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2025.....	40

Daftar Gambar



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kominfo Provinsi Jambi	10
---	----

BAB 1

PENDAHULUAN

BAB I berisi :

- 1.1. Struktur Organisasi
- 1.2. Tugas dan Fungsi
- 1.3. Isu-Isu Strategis
- 1.4. Keadaan Pegawai
- 1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana
- 1.6. Keuangan
- 1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Penyusunan Laporan Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2025 diharapkan dapat :

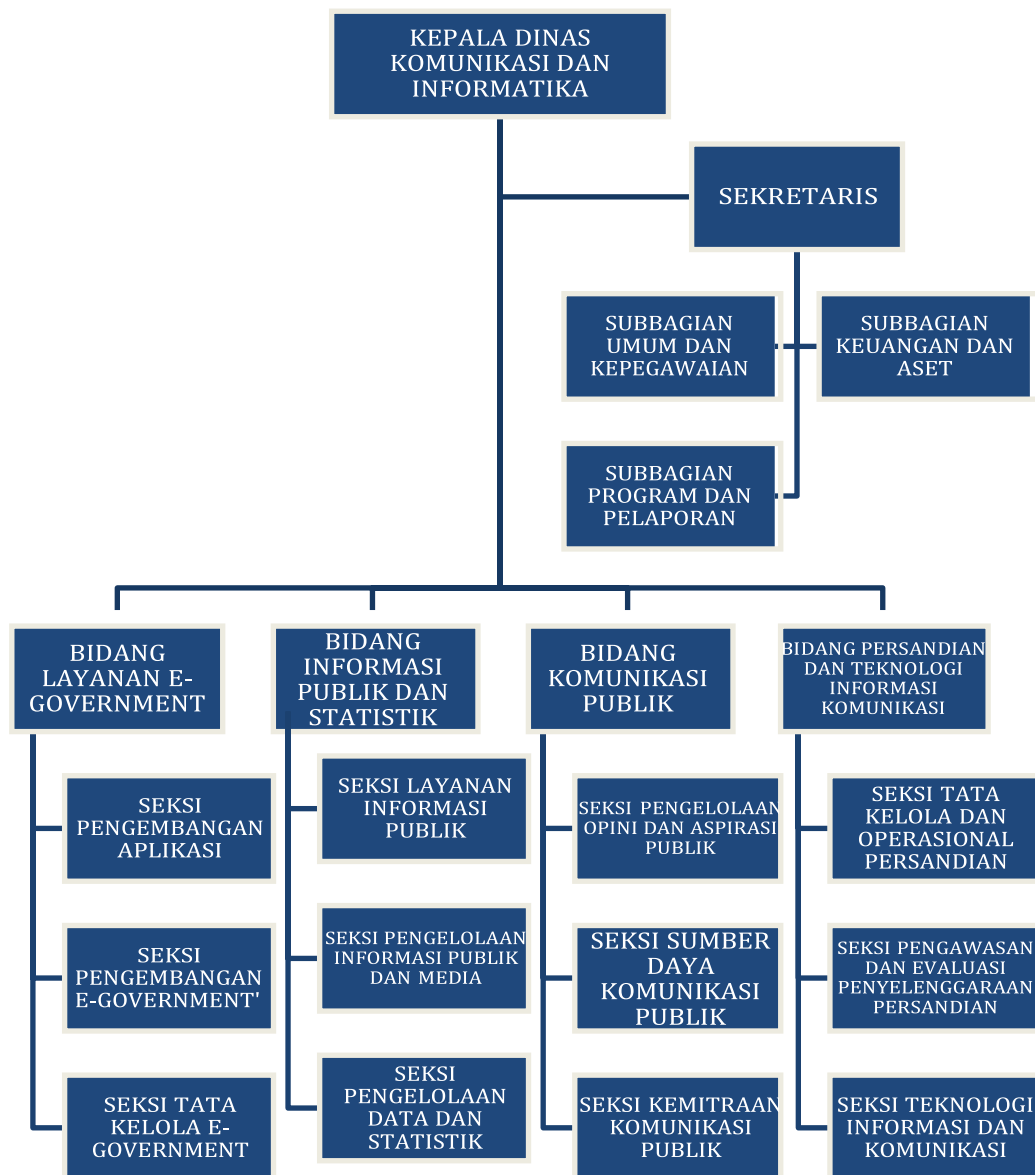
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kominfo Provinsi Jambi
2. Mendorong Dinas Kominfo Provinsi Jambi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kominfo Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kominfo Provinsi Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

Dinas Kominfo Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, Dinas yang dipimpin oleh Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kominfo Provinsi Jambi



1.2 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, Dinas Kominfo mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi, Informatika Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang Komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- c. Pelaksanaan pembinaan di bidang Komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Kominfo Provinsi Jambi senantiasa berusaha menjalankan Tugas dan Fungsi tersebut dengan baik, namun demikian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Kominfo Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Kominfo Provinsi Jambi , antara lain sebagai berikut:

1. Perlu adanya komitmen Bersama Perangkat daerah terkait keterbukaan Informasi publik pemerintah daerah mengingat sumber Informasi berasal dari Perangkat daerah dan menjamin ketersediaan layanan Informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat.
2. Pembentukan dan pemberdayaan masyarakat informatif melalui penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, dengan mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat secara mudah;
3. Jumlah kerjasama dengan media melebihi target namun perlu memperhatikan kriteria yang harus dipenuhi oleh media.
4. Penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet lingkup Pemerintah Provinsi Jambi pada semua Perangkat Daerah serta jaringan intranet kepada pemerintah kabupaten/kota yang juga merupakan indikator nasional;
5. Peningkatan komitmen dan implementasi e-Government Pemerintah Provinsi Jambi dengan memperhatikan percepatan penerapan system penghubung layanan pemerintah daerah, optimalisasi layanan pemerintah berbasis elektronik, dan;
6. Peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Jambi yang menguasai teknologi informasi secara berkala dan berkelanjutan.

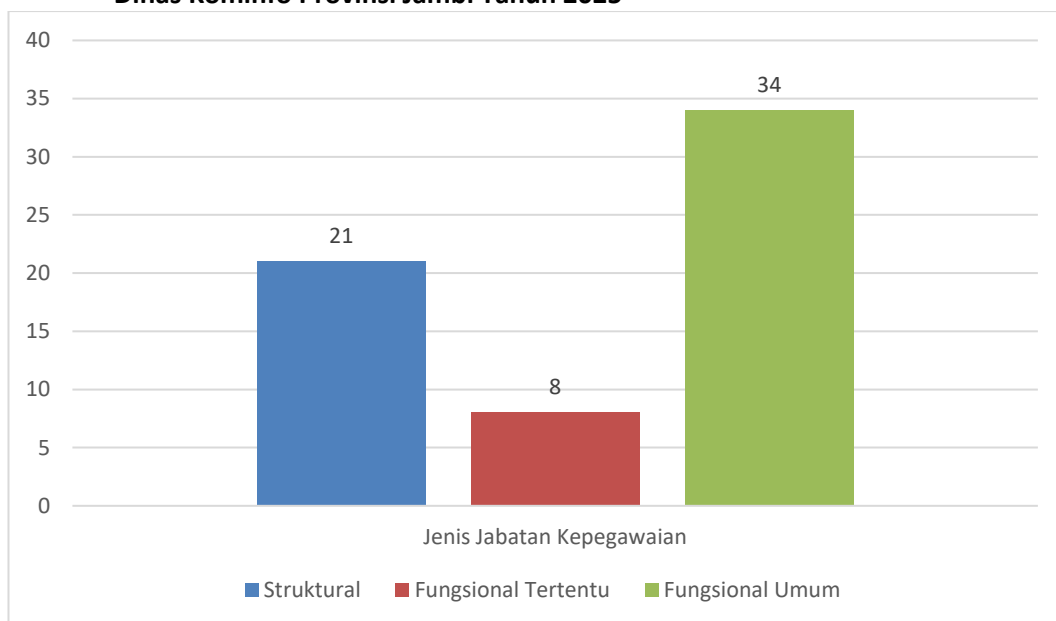
1.4 Keadaan Pegawai

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Kominfo Provinsi Jambi yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kominfo, Statistik dan Persandian sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Provinsi Jambi diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Dinas Kominfo Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2024, tercatat sebanyak 63 pegawai yang terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu, dan pejabat

fungsi umum. Profil Kepegawaian Dinas Kominfo Provinsi Jambi disajikan dalam tabel berikut :

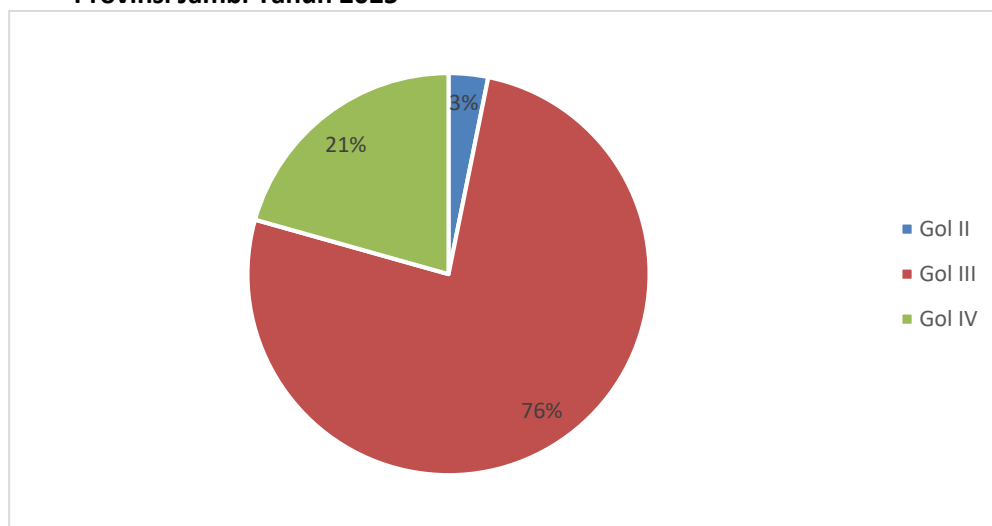
Grafik 1.1. Grafik Profil Kepegawaian berdasarkan Jenis Jabatan Kepegawaian Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2025



Sumber: Diskominfo Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas dapat tergambar bahwa jabatan kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi mayoritas menduduki jabatan fungsional umum. Untuk menciptakan iklim birokrasi yang lebih dinamis dan profesional dibutuhkan kekhususan pekerjaan yang berbeda-beda seperti pada jabatan fungsional tertentu. Jabatan pada rumpun kekomputeran sangat dibutuhkan untuk mendukung sasaran strategis dinas.

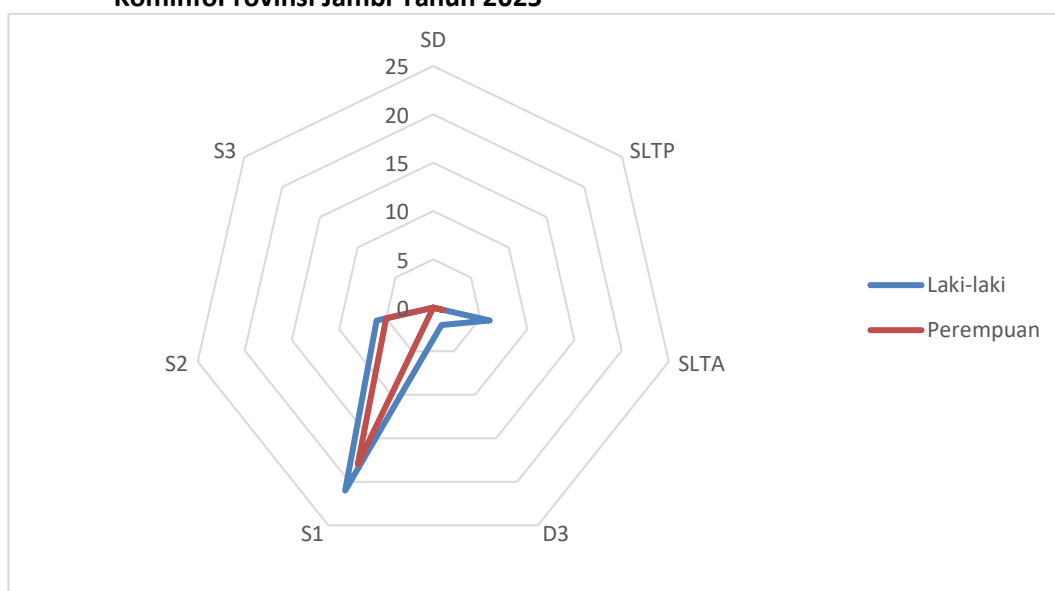
Grafik 1.2. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2025



Sumber: Diskominfo Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan jumlah pegawai berdasarkan golongan pada Dinas Kominfo yang sebagian besar merupakan pegawai Golongan III. Gambaran ini juga menunjukkan bahwa minimnya pegawai yang dapat melakukan uji kompetensi untuk menduduki jabatan fungsional tertentu dengan kualifikasi professional tingkat tinggi. Jika dilihat dari tingkat Pendidikan profil kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1.3. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2025



Sumber: Diskominfo Tahun 2025

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi lebih banyak didominasi oleh Sarjana S1 diikuti oleh Sarjana S2. Tingkat Pendidikan juga menggambarkan banyaknya pegawai belum berminat untuk meningkatkan kapasitasnya melalui jalur Pendidikan formal. Perlu dilakukan langkah untuk meningkatkan minat pegawai untuk meningkatkan kapasitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi sejauh ini telah cukup memadai untuk menunjang kinerja dan dapat ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada mayoritas berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Aset-aset Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi

NO	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi
1.	Alat Angkutan	31	Baik
2.	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	875	Baik
3.	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	84	Baik
4.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	2	Baik
5.	Komputer	797	Baik
6.	Gedung dan Bangunan	5	Baik
7.	Jalan, Jatringan dan Irigasi	19	Baik
8.	Aset tidak berwujud	59	Baik
9.	Aset lain-lain	222	Rusak Berat

Sumber: Diskominfo 2024

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan

dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Provinsi Jambi pada tahun 2025 berasal dari APBD Daerah Provinsi Jambi. Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Kominfo Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.39.167.379.795,- namun mengalami efisiensi atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi sebesar Rp.34.707.325.175 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.11.617.921.058,- dan Belanja Langsung Rp.23.089.404.117,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp.40.010.511.840,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.13.118.144.027,8 dan Belanja Langsung Rp.26.892.367.812,2. yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari seluruhnya berasal dari APBD yang didukung oleh 5 program dan 13 kegiatan.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi tahun 2025 adalah sebagai berikut

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun

mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKJIP/manfaat LKJIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Isu-Isu strategis, keadaan pegawai, Keuangan dan sistematika LKJIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah- langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang

berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

BAB 2

Perencanaan & Perjanjian Kinerja

Bab 2 berisi :

1. Perencanaan Strategis
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
3. Rencana Anggaran Tahun 2025
4. Instrumen Pendukung

2.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2021, Dinas Kominfo Provinsi Jambi menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2021- 2026. Renstra Dinas Kominfo Provinsi Jambi merupakan manifestasi komitmen Dinas Kominfo Provinsi Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan daldam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2016-2021).

RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Jambi merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama lima tahun, sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahunn 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Kominfo Provinsi Jambi yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Jambi berupaya untuk menyinambungkan perencanaan periode 5 tahun sebelumnya (2016-2021) dengan perencanaan periode yang setelahnya (2021-2026). Visi Misi Gubernur Provinsi Jambi pada perencanaan periode 2021-2026 berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan dengan periode sebelumnya. Visi pembangunan daerah dituangkan dalam RPJMD yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada waktu proses Pilihan Kepala Daerah adalah:

“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”. Dalam rangka mewujudkan tema visi tersebut, Gubernur Provinsi Jambi menyampaikan misi, yakni :

1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.
2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
3. Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia, yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir cascade RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 sebagai berikut,

Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026

Visi: “Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”					
No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Memantapkan tata kelola pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Predikat AKIP
				Terwujudnya Birokrasi yang kapabel dengan pelayanan publik yang prima	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
2.	Memantapkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah	Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pertumbuhan PDRB Hijau	Memantapkan pengelolaan komoditas unggulan non pertambangan	Skor tingkat kematangan Perangkat daerah provinsi Jambi
				Meningkatnya industri pengolahan	Indeks Kepuasan Masyarakat
				Meningkatkan peran sector pariwisata serta industri kecil dan menengah pendukung pariwisata	Kontribusi sector pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB
				Memantapkan kualitas pelayanandasar dan infrastruktur dasar	Kontribusi Industri pengolahan terhadap PDRB
					Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB
					Rasio Konektivitas
					Akses terhadap air minum layak
					Rasio elektrifikasi
					Persentase luas sawah beririgasi
					Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki akses internet
				Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
					Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca berbasis lahan (GRK) (juta ton CO2)
			Tingkat Kemiskinan	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka

				Meningkatkan ketersediaan pangan dan kemudahan akses terhadap pangan	Indeks ketahanan pangan
3.	Memantapkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berbudaya agamis dan kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup
				Meningkatnya akses terhadap pendidikan	Rata-rata lama sekolah
				Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan
				masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya	upacara adat
				Meningkatnya toleransi intra dan antar agama	Indeks kebebasan dari diskriminasi
				Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan	Indeks pemberdayaan gender

Sumber : RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Kominfo Provinsi Jambi berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu Memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kominfo Provinsi Jambi selama 5 tahun anggaran adalah:

1. Meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemprov Jambi.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran Strategis

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Sasaran Strategis Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemprov Jambi	Peringkat Keterbukaan informasi publik	Meningkatnya layanan Informasi dan Komunikasi publik	Persentase Informasi Publik yang disediakan	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Informatif	Informatif	Informatif
		Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral terupdate, valid dan terintegrasi	60%	70%	80%	90%	95%
Mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	Meningkatnya kualitas layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang terpadu	Persentase Administrasi pemerintahan dan layanan publik yang memanfaatkan TIK	2,7	2,8	3	3,3	3,5
		Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	Persentase Capaian Indeks Keamanan Informasi	40% Level 1	43% Level 1	45% Level 1-2	46% Level 2	47% Level 2-3

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks RB OPD	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	60	72	76	85	89
		Meningkatnya kualitas implementasi akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	B	BB	BB	BB	A

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2	3	4
1. Meningkatkan layanan Informasi dan Komunikasi publik. 2. Meningkatkan kualitas data statistik sektoral.	• Peningkatan peran PPID pembantu seluruh OPD dalam Keterbukaan Informasi • Peningkatan OPD dalam menyediakan data statistik sektoral	• mengarahkan seluruh perangkat Daerah agar informatif dalam penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat • mengintegrasikan seluruh data dalam satu portal
1. Meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintah dan layanan publik yang terpadu 2. Meningkatkan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	• Peningkatan Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE. • Penyusunan Kebijakan Internal Layanan SPBE. • Peningkatan keamanan informasi Penyelenggaraan pemerintahan dengan persandian	• Penyusunan dan optimalisasi Kebijakan Tata Kelola SPBE • Penyusunan dan optimalisasi Kebijakan Layanan SPBE • Tata Kelola Keamanan Informasi Yang Komprehensif dan Implementatif • Peningkatan SDM

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	• Peningkatan kualitas layanan terutama layanan Informasi kepada masyarakat	• Meningkatkan sarana dan Prasarana
2. Meningkatnya kualitas implementasi akuntabilitas kinerja	• Peningkatan kualitas perencanaan dan capaian kinerja	

Sumber : Renstra Dinas Kominfo 2021-2026

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemprov Jambi	Peringkat Keterbukaan Informasi Publik	Informatif
2	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Inndeks Pembangunan Statistik	2.8
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Pemerintah Provinsi Jambi	3.3
4.	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan infomasi pemerintah daerah	Persentase Capaian Indeks Keamanan Informasi	40%
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 (B)

		Nilai AKIP	75 (BB)
--	--	------------	---------

Sumber : Dinas Kominfo 2025

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Kominfo Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni yang bersumber dari APBD sebesar Rp.39.167.379.795,- kemudian mengalami efisiensi atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi sebesar Rp.34.707.325.175 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.11.617.921.058,- dan Belanja Langsung Rp.23.089.404.117,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp.40.010.511.840,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.13.118.144.027,8 dan Belanja Langsung Rp.26.892.367.812,2.

2.3.1 Target Belanja Dinas Kominfo Provinsi Jambi

Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Dinas Kominfo Provinsi Jambi menetapkan target belanja setelah perubahan sebesar Rp.40.067.858.836,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5 Target Belanja Dinas Kominfo Provinsi Jambi APBD Perubahan Tahun 2025

No	Uraian	Target	Prosentase
I	Belanja Operasi	Rp.37.778.407.825,08	94.42 %
1	Belanja Pegawai	Rp.10.018.144.027,80	25.04 %
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp.24.660.263.797,28	61.63 %
3	Belanja Hibah	Rp.3.100.000.000	7.75 %
II	Belanja Modal	Rp. 2.232.104.014,92	5.58 %
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.2.032.104.014,92	5.08 %
2	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp.200.000.000	0.50 %
	Jumlah	Rp.40.010.511.840	

Sumber : Dinas Kominfo 2024

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi

No.	Sasaran	Anggaran	Presentas	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemprov Jambi	Rp. 18.442.952.535	46%	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2.	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Rp.139.541.600	0,35%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp.8.674.246.555,50	22%	Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika
4.	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	Rp.318.114.057	1%	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Rp.12.435.657.092,50	31%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
	Jumlah	Rp.40.010.511.840		

Sumber: Dinas Kominfo 2025

2.4 Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Komunikasi Provinsi Jambi Tahun 2025, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dengan membangun beberapa sistem informasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE terdapat aplikasi umum yang telah dibangun oleh Pemerintah Pusat dan harus digunakan oleh setiap instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu, terdapat aplikasi khusus seperti pengembangan sistem kepuasan masyarakat yang mendukung penilaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara

terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Jambi. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 berisi :

1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya
3. Realisasi Anggaran

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Dinas Kominfo Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Provinsi Jambi tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kominfo Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kominfo Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA/ KODE WARNA
1	2	3	5	6	7	8
1.	Meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan	Peringkat Keterbukaan Informasi Publik	Informatif/ 91	Informatif/ 92.41	101.54%	

	pemerintahan dilingkungan Pemprov Jambi					
2.	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	2.8	2.68	95.71%	
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3.3	3,31	100,30%	
4.	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	Persentase Capaian Indeks Keamanan Informasi	40%	49.01%	122,52%	
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 (B)	92.14 (A)	108,4%	
		Nilai AKIP	75 (BB)	74 (BB)	98.6%	

Sumber : Dinas Kominfo 2025

Dinas Kominfo Provinsi Jambi memiliki 6 (enam) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Dinas Kominfo Provinsi Jambi. Berdasarkan tabel 3.2 dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 4 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 target;

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Kinerja Lainnya

Pada tahun 2025 Secara detil capaian kinerja Diskominfo Provinsi Jambi dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut :

Sasaran #1: Meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemprov Jambi.

Tabel 3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Kinerja Lainnya

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Peringkat Keterbukaan Informasi Publik	Informatif/ 91	Informatif/92,41	101.54%

Sasaran ini dicapai melalui program pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan / Sub Kegiatan :

- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- Pelayanan Informasi Publik
- Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah

Implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu indikator kinerja daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026. Untuk memastikan pemerintah daerah melaksanakan amanat tersebut pemerintah pusat memberikan wewenang kepada Komisi Informasi Pusat RI dengan tujuan mengukur transparansi badan publik serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang akuntabel, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dimana sasarannya adalah seluruh badan publik (Kementerian, Lembaga, BUMN, PTN, dan Pemerintah Provinsi) di Indonesia.

Secara keseluruhan, tahapan, proses dan instrumen yang digunakan tersebut diatas akan menghasilkan nilai dan kualifikasi peringkat Keterbukaan Informasi Publik sebagai berikut :

Tabel 3.4. Kualifikasi Penilaian Keterbukaan Informasi

NO	KUALIFIKASI PERINGKAT	NILAI INDEKS
1	Informatif	90 - 100
2	Menuju Informatif	80 – 89,9
3	Cukup Informatif	60 – 79,9
4	Kurang informatif	40 – 59,9
5	Tidak informatif	<39

Penilaian dilakukan berdasarkan pedoman peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi.

Berdasarkan hasil penilaian akhir yang termuat dalam Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 11/KEP/KIP/XII/2025 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jambi meraih predikat Informatif dengan nilai 92,41. Hasil tersebut di atas merupakan akumulasi dari dua tahapan Monev KIP,

pengisian kuisisioner melalui sistem aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id dan presentasi uji publik yang secara langsung dilaksanakan di Jakarta dimana masing-masing persentasenya adalah 80%+20%. Rincian nilai per aspek dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.5. Penilaian Kuisisioner Keterbukaan Informasi

No	Komponen SAQ	Standar Nilai oleh KI Pusat	Nilai Setelah Verifikasi	Capaian	Jumlah SAQ X 80%
1.	Mengumumkan Informasi Publik	25	23.75	95%	94.7 X 80%
2.	Menyediakan Dokumen Informasi Publik	10	9.8	98%	
3.	Pengembangan Website	20	19.6	98%	
4.	Barang dan Jasa	30	28.8	96%	
5.	Kelembagaan	15	12.75	85%	
	Total	100			75,76

Sumber: Komisi Informasi Pusat 2025 (diolah)

Dari rincian penilaian tersebut tergambar bahwa capaian empat komponen berhasil mencapai di atas 90% dari target yang telah ditetapkan sehingga dapat dikategorikan sangat baik. Capaian ini terutama terdapat perbaikan pada Informasi tentang pengadaan barang dan jasa harus memuat dokumen terkait tahap perencanaan, tahap pemilihan, dan tahap Pelaksanaan. Namun, pada komponen kelembagaan perlu perbaikan pemenuhan Administrasi karena capaian masih 85%. Setelah dilaksanakan uji publik, Pemerintah Provinsi Jambi mendapatkan nilai 16,65 sehingga total nilai menjadi 92,41 dalam kategori Informatif atau 101,54% dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
77.54 (Cukup Informatif)	79.31 (Cukup Informatif)	92.41 (Informatif)

Terjadi peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2025 sebesar 13,1 poin atau peningkatan sebesar 16,51%. Capaian ini diperoleh dengan adanya perbaikan yang dilakukan oleh PPID Utama. Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong capaian indikator peringkat keterbukaan Informasi publik yakni:

1. Menunjukkan komitmen terkait penyediaan Informasi khususnya mengumumkan minimal 2 sampai dengan 3 proyek strategis ke dalam link

website PPID Utama atau kedalam link jambiprov.go.id;

2. PPID menyediakan ruang untuk penyelenggaraan keterbukaan Informasi publik;
3. Memberikan pelatihan kepada Sumber Daya Manusia yang menyelenggarakan keterbukaan Informasi publik.

Realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah atau Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah

Indikator	Awal RPJMD 2021	Capaian			Target 2026	Capaian s/d 2024 terhadap Target 2026(%)
		2023	2024	2025		
Peringkat Keterbukaan informasi publik	Cukup Informatif	77,54	79,31	92,41	Informatif (95)	92,27%

Sumber: Diskominfo Provinsi Jambi Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi telah mencapai 92,27% dari target jangka menengah yang telah ditetapkan. Jika dilihat dari capaian Tahun 2023 dan komitmen seluruh stake holder capaian kinerja jangka menengah akan mencapai target utama yakni mencapai predikat informatif yang menandakan implementasi dari keterbukaan Informasi di Provinsi Jambi dan jaminan kepada publik atas Informasi yang telah disediakan.

Capaian kinerja ini jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Lainnya pada Tahun 2025 sebanyak 21 Pemprov telah mencapai predikat Informatif, lima Pemprov dengan predikat Menuju Informatif, tiga Pemprov berpredikat Cukup Informatif, tiga Pemprov berpredikat Kurang Informatif, dan enam Pemprov berpredikat Tidak Informatif. Dengan capaian Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan perbaikan dengan strategi yang tepat terutama pada komponen Penyediaan Informasi pengadaan barang dan jasa. Komponen tersebut mengalami perbaikan yang sangat penting untuk menjamin keterbukaan informasi.

Adapun rencana tindak lanjut dan memaksimalkan faktor pendorong, Dinas Komunikasi dan Informatika perlu melakukan:

1. Mengawasi komitmen atas dasar arahan langsung Gubernur Jambi pada 11 Desember 2024 untuk secara berkala memperbarui Informasi dan

daftar informasi;

2. Dinas Komunikasi dan Informatika perlu meningkatkan sarana dan Prasarana Gedung pada Tahun 2026; dan
3. Menyediakan anggaran untuk mengikuti bimtek dan menyediakan pelatihan untuk sumber daya manusia Komunikasi pada Tahun 2026.

Sasaran #2: Meningkatnya kualitas data statistik sektoral

Sasaran ini dicapai melalui program Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan/ Sub Kegiatan:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
2. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi
3. Membangun Metadata Statistik Sektoral

Tabel 3.8 Sasaran 2

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral terupdate, valid dan terintegrasi	2.8%	2.68	95.71%

Pada Tahun 2025 BPS tidak melakukan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral di pemerintah daerah berdasarkan surat Kepala BPS Provinsi Jambi nomor B-310/15000/TS.160/2025 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan EPSS TA.2025 di Pemerintah Daerah. sehingga Tahun 2025 menggunakan capaian Tahun 2024 dan tidak dapat menggambarkan kinerja Pemerintah Provinsi Jambi. Namun, Upaya mewujudkan satu data Indonesia terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi. Capaian saat ini dari 43 perangkat daerah terdapat 34 Perangkat Daerah yang melakukan pemenuhan data statistik sektoral. Capaian ini sejalan dengan target yang ditetapkan sebesar 80% dari jumlah OPD.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran yakni:

1. Diperlukan identifikasi data statistik sektoral pada setiap OPD;

2. Belum seluruh OPD menunjuk operator data dan menunjukan SK Walidata pendukung;
3. Belum seluruh OPD mengajukan usulan rekomendasi kegiatan statistik kepada Walidata.

Sebagai upaya perbaikan BPS sebagai Pembina data statistik melakukan evaluasi Penyelenggaraan statistik sektoral (EPSS) untuk mengukur capaian kemajuan Penyelenggaraan statistik sektoral, meningkatkan kualitas Penyelenggaraan statistik sektoral, dan meningkatkan kualitas pelayanan di bidang statistik. EPSS dilaksanakan berdasarkan Peraturan Badan Statistik Nomor 3 Tahun 2022 dengan keluaran hasil penilaian Indeks Pembangunan Statistik yang dilaksanakan pada Tahun 2024 dengan hasil nilai Pemerintah Provinsi Jambi sebesar 2,68 predikat BAIK.

Perbandingan realisasi Persentase Data Statistik Sektoral OPD terinventarisasi terupdate, valid dan terintegrasi tahun 2023-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Sasaran 2 Tahun 2023-2025

Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
1.88	2.68	2.68

Peningkatan terjadi di Tahun 2024 dengan adanya pembinaan yang dilaksanakan untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi. Upaya implementasi aturan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Menyukkseskan Satu Data Jambi tanggal 27 Desember 2023. Selain itu, komitmen tersebut telah direalisasikan dengan menugaskan operator data pada tiap OPD untuk bimbingan teknis pengolahan data yang akan dipublikasikan dalam website Open Data Jambi pada 26 Desember 2024.

Realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah atau Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah

Indikator	Awal RPJMD 2021	Capaian			Target 2026	Capaian s/d 2024 terhadap Target 2026 (%)
		2023	2024	2025		
Indeks Pembangunan Statistik	NA	1.88	2.68	2.68	3.0	89,33%

Sumber: Diskominfo Provinsi Jambi Tahun 2025

Capaian sasaran Meningkatnya kualitas data statistik sektoral dilakukan dengan mendorong seluruh OPD untuk memproduksi data yang sesuai dengan kaidah statistik. Hal ini juga dilakukan dengan pembinaan oleh BPS melalui evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dengan beberapa rekomendasi yakni:

1. Pemerintah Provinsi Jambi perlu menyusun SOP/Petunjuk teknis yang lebih rinci terkait standar data statistik, metadata statistik, interoperabilitas data, serta penerapan kode referensi;
2. Membuat reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan prinsip SDI serta melakukan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan;
3. Perlu melakukan identifikasi kebutuhan data dari setiap dinas/instansi di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan memastikan akurasi data dan konsistensi statistik yang dihasilkan dengan melaksanakan tahapan pemeriksaan akurasi data dan konsistensi statistik;
4. Perlu peningkatan aspek perencanaan data khususnya dalam pendefinisian kebutuhan statistik dengan melakukan Penyusunan daftar data;
5. Perlu adanya reviu portal data JDAC, dokumen kebijakan yang diterbitkan, Analisis Beban Kerja dan pemutakhiran jabatan yang memuat perencanaan dan realisasi pemenuhan SDM bidang statistik;
6. Mengaktifkan Forum Satu Data Indonesia dengan melakukan pembahasan Rencana Aksi Daerah di Provinsi Jambi;
7. Perlu dilakukan peningkatan sosialisasi dan literasi data oleh Pemerintah Provinsi Jambi.

Sasaran #3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sasaran ini dicapai melalui program Program Pengelolaan Aplikasi Informatika yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan/ Sub Kegiatan :

1. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain diLingkup Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Pengelolaan e-government diLingkup Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi
 - b. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik
 - c. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

Tabel 3.11 Sasaran 3

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,30 (Baik)	3,31 (Baik)	100,30%

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan/penerapan SPBE di K/L/Pemda. Indeks SPBE diperoleh dari hasil evaluasi SPBE terhadap K/L/Pemda yang dilakukan secara periodik untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari penerapan SPBE di setiap K/L/Pemda. Pengukuran Nilai Indeks SPBE tahun 2024 menggunakan PermenPANRB Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam peraturan tersebut juga dijabarkan predikat penilaian SPBE yang mempresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE seperti yang tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 3.12 Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik

3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Tim Kementerian PANRB bersama Asesor Eksternal telah melakukan verifikasi, validasi dan penilaian pelaksanaan SPBE dengan hasil yang tertera pada Sistem Informasi Evaluasi SPBE. Hasil evaluasi SPBE Pemerintah Provinsi Jambi tercatat di angka Indeks 3,31 dengan kategori baik. Rincian penilaian per aspek dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.13 Nilai Domain dan Apek SPBE Provinsi Jambi Tahun 2025

NAMA INDEKS	NILAI 2025
Domain 1 – Kebijakan SPBE	2,60
Aspek 1 - Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	2,60
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	2,80
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	3,00
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,50
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	3,00
Domain 3 - Manajemen SPBE	2,36
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	2,13
Aspek 6 - Audit TIK	3,00
Domain 4 - Layanan SPBE	4,14
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,90
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	4,50

Berdasarkan tabel 3.13 menunjukan bahwa Domain dengan capaian nilai tertinggi yakni pada Domain 4/ Layanan SPBE dengan nilai 4,14 dan nilai Domain terendah pada Domain 3/Manajemen SPBE. Jika dilihat lebih lanjut nilai aspek terendah pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE sebesar 2,13 diikuti oleh Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendapatkan nilai 2,50. Meskipun demikian terdapat peningkatan dibandingkan capaian Tahun 2024 dengan adanya peningkatan di beberapa Domain dan Aspek penilaian.

Tabel 3.14 Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2022-2024

Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
3,3` (Baik)	3,05 (Baik)	3,31 (Baik)

Capaian nilai Indeks SPBE Tahun 2025 terjadi peningkatan sebesar 0,26. Adapun faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Terdapat kelemahan pada pemenuhan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Jaringan Intra, Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi, dan Kebijakan Audit TIK;
2. Pada Aspek Perencanaan Strategis belum memenuhi kaidah dan muatan secara menyeluruh;
3. Belum dapat menunjukkan bukti dukung berkaitan dengan proses pembangunan aplikasi SPBE yang telah dikonsultasikan kepada unit kerja/Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK dan minimnya bukti dukung pemanfaatan penghubung layanan; dan

Pada penerapan manajemen SPBE, bukti dukung yang ditampilkan belum diikuti oleh program kegiatan yang terarah dan terencana. Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja antara lain sebagai berikut:

1. Dukungan seluruh OPD yang ditunjukkan oleh pemanfaatan/penggunaan aplikasi umum sehingga dapat menunjang layanan Administrasi pemerintahan berbasis elektronik didukung dengan aplikasi khusus yang telah dibangun; dan
2. Penyelenggaraan layanan publik berbasis elektronik sudah dilaksanakan dengan adanya pemanfaatan SP4N Lapor, JDAC, JDIHN, OSS, E-Samsat dan SIMRSJ.

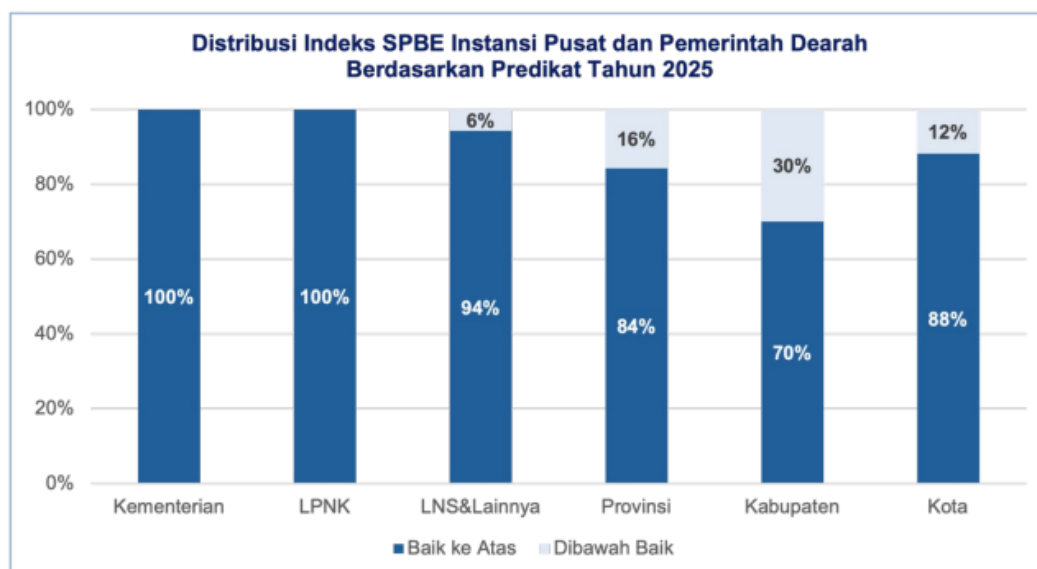
Realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah atau Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15 Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah

Indikator	Awal RPJMD 2021	Capaian			Target 2026	Capaian s/d 2024 terhadap Target 2026 (%)
		2023	2024	2025		
Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2,16 (Cukup)	3,31	3,05	3,31	3,5	94,57%

Sumber: Diskominfo Provinsi Jambi Tahun 2025

Jika dilihat perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah, capaian kinerja mencapai 94,57%. Capaian ini masih sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memerlukan kesinambungan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan seluruh Perangkat daerah. Capaian Pemerintah Provinsi Jambi juga sama dengan 84% Pemerintah Provinsi Lainnya yang mendapatkan predikat baik sebagaimana tergambar pada grafik 3.15.

Grafik 3.1. Distribusi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2025

Sumber: Kemenpan RB RI Tahun 2025

Capaian Kinerja Sasaran Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat ditingkatkan dengan strategi:

1. Memperkuat keunggulan yang dimiliki pada aspek layanan Administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan aspek layanan digital;
2. Memperbaiki kekurangan terutama pada aspek kebijakan internal, aspek perencanaan strategis dan aspek penerapan manajemen; dan
3. Perlu memperkuat komitmen penerapan SPBE melalui pemenuhan dan kelengkapan aspek perencanaan strategis dan aspek kebijakan internal

seperti kebijakan arsitektur SPBE, kebijakan internal layanan jaringan intra, kebijakan system penghubung layanan, kebijakan manajemen Keamanan Informasi dan kebijakan audit TIK.

4. Melakukan Persiapan Transformasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintah Digital (PEMDI).

Sasaran #4: Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah

Sasaran ini dicapai melalui program Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan/ Sub Kegiatan :

1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

Tabel 3.16 Sasaran 4

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Keamanan Informasi	40%	49.01%	122.52%

Penyelenggaraan persandian di Pemerintah Daerah Provinsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di bidang persandian yakni; (1) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi dan (2) penetapan pola hubungan Komunikasi antar Perangkat daerah provinsi. Pada pelaksanaannya alat evaluasi untuk menganalisis tingkat kesiapan pengamanan Informasi di organisasi Pemerintah Daerah menggunakan penilaian Indeks KAMI. Namun, terdapat perbedaan total nilai dari perubahan Indeks KAMI 4.0 menjadi Indeks KAMI 5.0 yang menyebabkan perubahan target pada perjanjian kinerja. Badan Siber dan Sandi Negara RI ditunjuk sebagai penilai melakukan verifikasi terhadap penilaian mandiri yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kominfo

Provinsi Jambi pada enam aspek yakni :

1. Tata Kelola;
2. Pengelolaan Resiko;
3. Kerangka Kerja Keamanan Informasi;
4. Pengelolaan Aset;
5. Teknologi dan Keamanan Informasi;
6. Perlindungan Data Pribadi;

Dari hasil penilaian mandiri total nilai dengan dasar kelengkapan penerapan standar ISO 27001 sesuai kategori berada pada nilai 449. Namun setelah dilakukan verifikasi oleh Badan Riset dan Sandi Negara RI diperoleh nilai yang lebih rendah yakni 449. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran tercantum dalam laporan onsite Assesment Indeks KAMI yang terbatas. Jika dilihat dari capaian kinerja dari beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan yang cukup signifikan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan pada Tahun 2024. Capaian kinerja beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.17 Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
52%	58.75%	49.01%

Penurunan terjadi akibat perubahan Indeks KAMI menjadi 5.0. jika dilihat dari target, peningkatan capaian kinerja terjadi cukup signifikan pada Tahun 2025.

Faktor-faktor yang menjadi pendukung terjadinya peningkatan yakni:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi telah menyiapkan dokumen pendukung terutama kebijakan dan prosedur yang diperlukan pada penyelenggaraan persandian;
2. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang tercantum dalam SOTK organisasi dan SK Gubernur tentang pembentukan tim CSIRT; dan
3. Pelaksanaan Keamanan secara berkala didukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur keamanan dan sumber daya manusia yang melakukan pengawasan secara rutin.

Realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah atau Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18 Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah

Indikator	Awal RPJMD 2021	Capaian			Target 2026	Capaian s/d 2024 terhadap Target 2026 (%)
		2023	2024	2025		
Persentase Capaian Indeks Keamanan Informasi	Level 1	52%	58,75%	49.01	47%	104.27%

Capaian sasaran Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah telah mencapai 104.27% dari target jangka menengah yang telah ditetapkan. Realisasi yang melampaui target yang telah ditetapkan merupakan prestasi yang sangat baik untuk kepentingan organisasi. Meskipun melampaui target, pada Tahun 2025 terjadi perubahan penilaian yang berdampak pada naiknya jumlah yang dinilai dari 645 menjadi 918 atau menggunakan Indeks KAMI 5.0. dengan adanya perubahan tersebut, capaian kinerja Tahun 2025 sangat baik dengan adanya pemenuhan pada level kebijakan dan implementasi kebijakan yang sudah dilaksanakan.

Pemerintah Provinsi Jambi perlu mendorong terwujudnya sistem manajemen Keamanan Informasi secara optimal dengan mempertimbangkan tiga komponen yakni Sumber Daya Manusia, Proses, dan teknologi serta meningkatkan penerapan perlindungan data pribadi yang merupakan aspek yang mengalami perubahan signifikan secara penilaian. Peningkatan tersebut dilakukan dengan memenuhi:

1. Spesialisasi SDM pada penyelenggaraan Keamanan Informasi dengan merujuk pada Peraturan BSSN Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kamus Kompetensi Keamanan Informasi, Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi;
2. Menyiapkan berbagai aspek Proses dengan mendorong perlindungan data pribadi yang digunakan pada proses kerja, mempertimbangkan aspek Keamanan Informasi pada setiap kebijakan dan menyusun pengelolaan resiko SPBE;
3. Pada Aspek Teknologi perlu dilakukan pengembangan pada Standar Keamanan dan pengawasan secara berkala dan meningkatkan kehandalan Keamanan dengan melibatkan pihak independen untuk mengkaji kehandalan Keamanan Informasi secara rutin.

4. Memberikan jaminan kepada pengguna terhadap perlindungan data pribadi dan mendokumentasikan proses perlindungan data pribadi serta menyertakan aspek perlindungan data pribadi pada kajian risiko.

Sasaran #5: Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Akunntabilitas Kinerja

1. Indikator Kesatu

Tabel 3.19 Sasaran 5

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	85 (B)	92.14 (A)	108,4%

Indikator sasaran ini dicapai melalui program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan/ Sub Kegiatan:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkandalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala. Dimana salah satu kegiatan yang harus ada adalah dengan melakukan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

(SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan dan mengacu pada kategori mutu pelayanan, maka diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jambi Tahun 2025 sebesar 92,14 meningkat dari tahun 2024 sebesar 91,12 dan berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori Sangat Baik, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 88,31-100. Rata-rata dari semua unsur pelayanan, kinerja pelayanannya adalah sangat baik.

Tabel 3.20 Pengukuran IKM

No.	Unsur Pelayanan	Nilar Rata-Rata	NRR X 25
U1	Persyaratan pelayanan	3,72	93
U2	Prosedur pelayanan	3,6	90
U3	Waktu pelayanan	3,65	91,25
U4	Biaya/tarif pelayanan	3,74	93,5
U5	Produk/hasil pelayanan	3,75	93,75
U6	Kemampuan petugas pelayanan	3,7	92,5
U7	Perilaku petugas pelayanan	3,74	93,5
U8	Kualitas sarana dan Prasarana	3,47	86,75
U9	Penanganan pengaduan pelayanan	3,80	95
Indeks Kepuasan Masyarakat		3.68	92,14

Berdasarkan tabel IKM per unsur pada Diskominfo Provinsi Jambi Tahun 2024, nilai rata-rata untuk setiap unsur pelayanan berada dalam rentang 3.40 hingga 3.80. Unsur "Prosedur", "Jangka Waktu" dan "Sarana Prasarana" mendapatkan nilai lebih rendah, masing-masing 3.6, 3.65 dan 3.47, namun masih masuk dalam kategori "Sangat Baik". Unsur lainnya, seperti "Pengaduan" dan "tarif", memiliki nilai tertinggi, yakni 3.80 dan 3.74.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Sarana dan prasarana menjadi unsur dengan nilai terendah, menunjukkan adanya ketidakpuasan dari pengguna layanan terhadap fasilitas yang tersedia.
- Waktu penyelesaian mendapatkan nilai terendah kedua, yang mengindikasikan adanya keluhan terhadap lamanya proses penyelesaian layanan. Permasalahan ini memperlihatkan perlunya perbaikan dalam efisiensi dan kecepatan layanan yang diberikan, sehingga pengguna tidak mengalami keterlambatan yang berlarut-larut.

- Prosedur juga menunjukan tiga nilai yang lebih rendah dibandingkan unsur lainnya sehingga perlu dilakukan review terhadap alur layanan .

Tabel 3.21 Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
79,26/ Baik	91,12/ Sangat Baik	92,14/ Sangat Baik

Peningkatan capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya akibat adanya faktor-faktor pendorong berupa:

1. Menggunakan Sistem Informasi berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang memudahkan proses survei dan pengolahan data;
2. Petugas yang melakukan survei telah dibekali dengan persiapan sehingga dapat terlaksana dengan baik;
3. Laporan SKM telah disusun berdasarkan analisis kebutuhan organisasi.

Realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah atau Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22 Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah

Indikator	Awal RPJMD 2021	Capaian			Target 2026	Capaian s/d 2024 terhadap Target 2026 (%)
		2023	2024	2025		
Indeks Kepuasan Masyarakat	NA	79,26	91,12	92,14	94	98.02%

Capaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tahun 2025 terhadap target 2026 sebesar 98.02% atau sesuai dengan perkiraan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini perlu ditingkatkan dengan melakukan perbaikan berdasarkan kelemahan yang ditemui pada hasil survei dengan mempertimbangkan saran/kritik dari responden. Meskipun demikian terdapat area yang perlu ditingkatkan yakni dengan:

1. Menyediakan infografis alur pelayanan di layar monitor ruang tunggu;
2. Mengunggah perkembangan layanan terbaru di situs web Diskominfo agar penerima layanan dapat memeriksa status layanan; dan
3. Melakukan review terhadap prosedur layanan Diskominfo.

2. Indikator Kedua

Tabel 3.23 Sasaran 6

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Nilai AKIP	75 (BB)	74 (BB)	98.6%

Sasaran ini dicapai melalui program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan/ Sub Kegiatan:

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD

Nilai Akuntabilitas Kinerja menggambarkan sudah sejauh mana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakannya. Nilai tersebut diperoleh melalui Evaluasi Implementasi SAKIP yang dilakukan berdasarkan Permen-PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan kebijakan tersebut, hasil penilaian evaluasi SAKIP di instansi pemerintah dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3.24 Nilai Akuntabilitas Kinerja

No.	Nilai	Predikat	Interpretasi
1.	>90 - 100	AA	Sangat Memuaskan
2.	>80 – 90	A	Memuaskan
3.	>70 – 80	BB	Sangat Baik
4.	>60 – 70	B	Baik
5.	>50 - 60	CC	Cukup (Memadai)
6.	>30 – 50	C	Kurang
7.	>0 - 30	D	Sangat Kurang

Penilaian SAKIP dilakukan pada tahun berikutnya sehingga pada proses pembuatan laporan kinerja instansi Pemerintah menggunakan hasil penilaian SAKIP tahun 2024 dengan hasil 74 Kategori Sangat Baik dengan predikat BB. Untuk menerapkan akuntabilitas yang lebih efektif, rekomendasi yang telah diberikan antara lain:

- 1) Agar Perjanjian kinerja pejabat dan Staf Pelaksana disusun dan diformalkan paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan;
- 2) Melakukan penyempurnaan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja sesuai dengan level jabatan (cascading kinerja) dengan memperhatikan kriteria SMART (specific, measureable, achieveable, relevan, time bond) serta memastikan penentuan target kinerja terukur, selaras, dapat dicapai, dan menantang;
- 3) Menggunakan Informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan target kinerja tahun selanjutnya;
- 4) Menyusun kebijakan terkait pemberian penghargaan dan sanksi lingkup unit kerja;
- 5) Menggunakan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan perencanaan kinerja dan mengambil langkah konkrit terkait Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
- 6) Agar melakukan monitoring dan evaluasi (monev) Rencana Aksi triwulan 1,2,3, dan 4 dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan unit kerja/bidang dengan mengetahui pimpinan OPD yang disertai dengan jadwal evaluasi dan membuat notulensi rapat mempedomani Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas, factor penghambat dan pendorong selaras pada aplikasi E-PAKET Jambi.

Perbandingan realisasi Nilai SAKIP tahun 2023-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.25 Realisasi Tahun 2023-2025

Realisasi 2023 (SAKIP 2022)	Realisasi 2024 (SAKIP 2023)	Realisasi 2025 (SAKIP 2024)
62,11/ B/ Baik	70,15/ BB/ Sangat Baik	74/ BB/ Sangat Baik

Terjadi peningkatan nilai yang menunjukkan adanya perbaikan pada akuntabilitas kinerja. Namun jika dilihat dari target jangka menengah yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika perlu melakukan perbaikan secara berkelanjutan dan memberikan dampak pada capaian kinerja organisasi. Realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah atau Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.26 Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah

Indikator	Awal RPJMD 2021	Capaian			Target 2026	Capaian s/d 2024 terhadap Target 2026 (%)
		2023	2024	2025		
Nilai AKIP	B	62,12/B	70,15/BB	74/BB	A (>80)	92.5%

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan kualitas implementasi akuntabilitas kinerja Tahun 2025 terhadap target 2026 sebesar 92.5%. Diperlukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

3.3. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2025 sebesar Rp.38.657.146.664, - (96.62%) dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 27.214.501.500,- (98.9%), sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.11.442.645.164 (92.01%).

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.27 Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2025

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi %
1			2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai Akip / Predikat Akip	12.435.657.092	11.442.645.164	92.01
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya kualitas perencanaan OPD	172.469.784	162.820.995	94.41
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	21.822.984	20.010.730	91.70
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah dokumen laporan	150.646.800	142.810.265	94.80

	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		10.227.148.328	9.492.451.405	92.82	
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dantunjangan ASN	10.018.144.028	9.286.579.325	92.70
		2	Pelaksanaan dan Penatausahaandan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	206.004.400	202.884.680	98.49
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	2.999.900	2.987.400	99.58
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		206.008.800	183.801.674	89.22	
		1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan/latih an Berdasarkan Tugas danFungsi	206.008.800	183.801.674	89.22
		2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	0	0	0
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		700.355.163	563.102.060	80.40	
		1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	175.535.175	125.091.505	71.26
		2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetaka dan Penggandaan yangDisediakan	9.489.540	9.184.260	96.78
		3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	29.057.040	21.198.000	72.95
		4	Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	486.273.407	407.628.295	83.83

	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		523.169.440	485.928.781	92.88
		1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	0	0
		2	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	210.719.244	206.011.781
		3	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	312.450.196	279.917.000
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		24.880.778	23.783.751	95.59
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15.120.000	14.242.973
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9.760.778	9.540.778
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		581.624.800	530.756.498	91.25
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah KendaraanDinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara danDibayarkan Pajak dan Perizinannya	320.092.000	274.811.950
		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	204.272.800	199.574.598

		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	57.260.000	56.369.950	98.45
2.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			Presentase peningkatan kualitas komunikasi publik melalui pengelolaan Opini/Aspirasi publik, penguatan kapasitas sumber daya dan kemitraan komunikasi publik	18.442.952.535	18.197.947.536	98.67
	1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	18.442.952.535	18.197.947.536	98.67
		1	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	108.309.100	106.362.600	98.20
		2	Dukungan Administrasi, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang Akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1.947.167.084	1.872.168.437	96.15
		3	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2.474.577.870	2.468.343.610	99.75
		4	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	175.685.250	164.088.475	93.40

		5	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	379.994.480	352.845.207	92.86
		6	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	13.357.218.750	13.234.139.207	99.08
3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang dapat menggunakan sistem aplikasi dan terkoneksi ke Jaringan Internet Pemerintah	8.674.246.555	8.569.827.737	98.80
	1		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Tersedianya domain dan sub domain yang terstruktur	50.731.296	46.036.145	90.75
		1	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan dan nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	50.731.296	46.036.145	90.75
	2		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat dan sistem informasi penunjang penerapan SPBE di Provinsi Jambi	8.623.515.259	8.523.791.592	98.84
		1	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	152.178.800	149.829.248	98.46

		2	Pengembangan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	568.344.400	565.661.061	99.53
		3	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	350.000.000	348.540.000	99.58
		4	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	7.081.790.059	7.052.184.442	99.58
		5	Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Operasionalisasi Pusat Kendali	471.202.000	407.576.841	86.50
4		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase ketersediaan data statistik sektoral	139.541.600	136.622.040	97.91
	1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi		Persentase Pemanfaatan Statistik sektoral Dalam Perencanaan Dalam Ekspose Pembangunan Daerah	139.541.600	136.622.040	97.91
		1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	23.828.000	23.114.840	97.01

		2	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	84.660.600	83.815.200	99.00
		3	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	31.053.000	29.692.000	95.62
5			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	318.114.057	310.104.187	97.36
		1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Mewujudkan Keamanan Informasi dalam mendukung penyelenggaraan system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan Non Elektronik	299.533.057	291.646.387	97.36
		1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi, dan kebijakan jaring komunikasi sandi Pemerintah daerah provinsi	10.030.732	9.986.282	99.56
		2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Audit Keamanan Informasi di Pemerintah Provinsi Jambi	82.110.900	82.094.495	99.98
		3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Keamanan Informasi Provinsi dan Kab/Kota	64.245.025	59.077.326	91.96

		4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	143.166.400	140.488.284	98.13
	2		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Perangkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi Jambi	18.561.000	18.457.800	99.44
		1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	18.561.000	18.457.800	99.44
					40.010.511.840	38.657.146.664	96.62

Tabel 3.28 Analisis efisiensi Dinas Kominfo Provinsi Jambi Tahun 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR	%CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemprov Jambi	Peringkat Keterbukaan Informasi Publik	101.54	98.67
2.	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	95.71	97.91
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	100.30	98.80
4.	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	Persentase Capaian Indeks Keamanan Informasi	122.52	97.48
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	108.4	94.41
		Nilai AKIP	98.6	91.98

RATA -RATA		104.51	96,62
EFISIENSI	CAPAIAN >100% dengan serapan anggaran 96,62%	3.38% efisiensi anggaran atau Rp. 1.353.365.176,-	

Sumber: Dinas Kominfo 2025

Berdasarkan tabel 3.28 di atas, kinerja sasaran strategis Dinas Kominfo Provinsi Jambi telah melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebesar 3.38%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi dan penghematan penggunaan sarana prasarana. Pada sasaran Meningkatnya kualitas data statistik sektoral upaya perbaikan telah dilakukan namun dikarenakan adanya kebijakan tidak dilaksanakannya Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2025 sehingga menggunakan capaian Tahun 2024 dan tidak dapat mencerminkan kinerja yang dilakukan pada Tahun 2025.

BAB 4

Penutup

Bab 4 berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rencana Tindak Lanjut*

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas kominfo pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis Dinas Kominfo Tahun 2021-2026.

Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Kominfo tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian reealisasi di atas 100% sebanyak 4 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 target;

Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja pada capaian indikator peringkat keterbukaan Informasi publik yang belum mencapai target 100%. Meskipun begitu terhadap indikator lainnya yang telah mencapai target maupun melebihi, juga perlu dilakukan strategi yang tepat untuk dapat meningkatkan kinerja.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Menjaga komitmen keterbukaan Informasi terus dilaksanakan oleh setiap PPID.
2. Menyediakan regulasi atau prosedur untuk mendukung pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik.
3. Melakukan penguatan pada Penyelenggaraan statistik sektoral di Pemerintah Provinsi Jambi.
4. Menindaklanjuti rekomendasi LHE AKIP untuk perbaikan nilai SAKIP.
5. Melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih berkualitas, melalui pendekatan 4 (empat) pilar *Balance*

Score Card (BSC) yang meliputi pendekatan customer perspective, internal process, financial perspective, dan learning and growth perspective.



LAMPIRAN



Provinsi Jambi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DRS. ARIANSYAH, ME

Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : DR. H. AL HARIS, S.SOS, M.H

Jabatan : GUBERNUR JAMBI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selanjutnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

DR. H. AL HARIS, S.SOS, M.H
GUBERNUR JAMBI

DRS. ARIANSYAH, ME
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/D)
NIP. 197206031993021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	Persentase Capaian Indeks Keamanan Informasi	40 Persen
2	Meningkatnya kualitas data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	2.8 Nilai
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 Nilai
		Nilai AKIP	75 Nilai
4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	3.3 Nilai
5	Meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemprov Jambi	Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	91 nilai

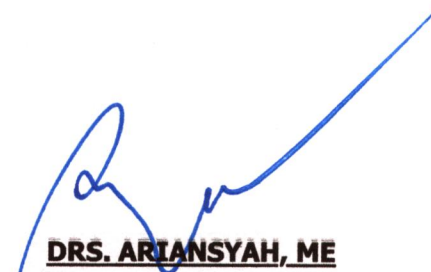
NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	17.123.549.473	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	254.011.900	
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	7.355.953.684	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	583.219.717	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	13.850.645.020	

Jambi, 31 Januari 2025

GUBERNUR JAMBI

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


DR. H. AL HARIS, S.SOS, M.H
GUBERNUR JAMBI


DRS. ARIANSYAH, ME
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/D)
NIP. 197206031993021001